

Konflik Sosial: Budaya Politik Uang Di Desa Puguh Kabupaten Kendal Jawa Tengah

Dela Adelia Puspita

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Dea Opie Pancaraningrum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Salsabillah Rizqi Fihru Amani Fatikhah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Korespondensi penulis: delaadr28@gmail.com

Abstract: *Pilkades or Puguh village elections are decorated with politics of money to attract the people's vote, so the politics of money became a normal thing and had become a culture before the village head elections took place. Using an ethnographic approach that focuses on a descriptive development of the political culture of money within a Puguh village community. Results and research discussions of understanding on political money and social conflict. The politics of money itself comes because the elite or prospective village heads seek an influential position in the village, and also because of people who are less conscious of Pancasila values and lack of understanding in politically-related communities. In this case the political culture of money itself leads to social conflicts within the society, a conflict of tension in one's interaction with another.*

Keywords: *Pilkades; culture; money politic; conflict*

Abstrak. Pilkades atau pemilihan kepala desa di desa Puguh yang dihiasi dengan politik uang untuk menarik suara masyarakat, sehingga politik uang menjadi hal wajar dan telah menjadi sebuah budaya sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan etnografi yang berfokus pada pengembangan deskriptif tentang budaya politik uang di dalam suatu kelompok masyarakat desa Puguh. Hasil dan diskusi penelitian berupa pengertian mengenai politik uang serta konflik sosial. Politik uang sendiri terjadi karena para elit atau kandidat calon kepala desa merebutkan posisi yang berpengaruh di desa tersebut, selain itu juga karena masyarakat yang kurang sadar akan nilai-nilai Pancasila serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait politik. Dalam kasus ini budaya politik uang sendiri menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat, konflik yang berupa ketegangan dalam berinteraksi satu dengan yang lain.

Kata kunci: Pilkades; budaya; politik uang; konflik

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi. Dengan bentuk pemerintahan tersebut masyarakat Indonesia memiliki hak dalam menentukan pilihan masing-masing, dalam kata lain masyarakat dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan, pembahasan serta pembuatan hukum. Partisipasi masyarakat sendiri biasanya dikenal sebagai partisipasi politik yang dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik. Salah satu kegiatan politik yang sering dijumpai di seluruh pelosok Indonesia yaitu pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lain sebagainya. Selain Pemilu juga terdapat Pilkades, yang merupakan kegiatan politik yang digunakan untuk memberikan hak suara dalam pemilihan kepala desa.

Pilkades yang dilakukan di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan pilkades yang terjadi di daerah lain, yaitu dengan melakukan kampanye kepada warga masyarakat di desa guna mendapatkan suara. Hal itu menyebabkan adanya persaingan antara calon kepala desa yang satu dan yang lainnya, berbagai cara pun dilakukan untuk mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan calon kepala desa yang lain.

Adanya persaingan antar calon kepala desa atau para elit untuk mendapatkan suara dan dukungan dalam pemilihan kepala desa dianggap sudah wajar, yang menjadi masalah adalah seringkali para calon kepala desa ini melakukan pelanggaran dengan menggunakan *money politic* atau politik uang yaitu dengan memberikan uang kepada para pemilih. Hal ini dilakukan karena mereka berpikir bahwa uang adalah sumber kampanye yang sangat tepat sebab sangat minim kemungkinan masyarakat akan menolak bantuan yang dianggap sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat desa. Uang yang diberikan ini dijadikan sebagai sumber untuk bertukar suara. Dalam kampanye, jika salah satu calon kepala desa memberikan sogokan, masyarakat pun tidak akan mempertanyakan untuk apa uang tersebut.

Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk mengetahui fenomena politik uang, akan tetapi juga mengenai konflik sosial di masyarakat yang ditimbulkan oleh budaya praktik politik uang.

KAJIAN TEORITIS

Budaya politik yang terjadi di Desa Puguh ini menyebabkan konflik antar masyarakat. Konflik sendiri dapat berupa ketidaksepakatan, perselisihan, peperangan, perkelahian dan lain sebagainya. Konflik dapat terjadi di berbagai tingkat organisasi sosial baik kelompok, organisasi, hingga sistem masyarakat. Dalam kehidupan, konflik dapat ditemukan di hampir setiap interaksi manusia, banyak dampak negatif yang dapat disebabkan oleh Konflik salah satunya adalah perpecahan. Akan tetapi, Konflik juga memiliki fungsi positif atau dampak positif bagi beberapa pihak.

Dalam teori kritis politik uang mengacu pada hubungan antara kekuasaan politik, serta demokrasi. Praktik politik uang sendiri, teori kritik mengkritisi adanya pengaruh sebuah dominasi yang memiliki kekayaan serta modal dalam berpolitik, sehingga menghasilkan ketidaksetaraan dalam representasi politik. Politik uang sendiri hadir dari dominasi para elit yang memiliki modal.

Salah satu konsep teori kritis Hebermas sendiri adalah "kolonialisasi duni-hidup" atau *colonization of the lifeword*. Dimana dalam masyarakat modern, dunia-hidup, yaitu dunia pengalaman sehari-hari yang dimiliki oleh individu-individu, semakin terpengaruh oleh logika sistem-sistem sosial seperti ekonomi, politik, dan birokrasi. Hal ini mengarah pada dominasi struktur kekuasaan yang mengancam kebebasan individu dan solidaritas sosial (Supraja, 2018).

Penelitian terdahulu yang menggunakan tema serupa adalah mengenai fenomena politik uang di Desa Petiken yang dilakukan oleh Fauzi dan Fauzi, dengan artikel yang berjudul "Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan etnografis. Dengan pendekatan etnografis, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara menganalisis pandangan-pandangan atau perspektif para informan. Informan sendiri akan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana dalam pemilihan atau penentuan informan perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tema penelitian. Kemudian, untuk latar tempat atau lokasi dilakukannya penelitian yaitu di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa

Budaya merupakan sebuah pewarisan watak yang berlangsung dari generasi ke generasi yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, budaya juga dapat diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara terus menerus hingga menjadi kebiasaan turun temurun. Adapun budaya politik yang sering terjadi dan dapat dijumpai pada masyarakat Indonesia adalah budaya politik uang. Yang artinya politik uang sudah menjadi kebiasaan yang sudah tertanam di masyarakat, sehingga dapat dikenali sebagai budaya sebelum pemilihan umum dilakukan.

Politik uang sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai pertukaran dalam pengertian ekonomi sederhana, bisa jadi memiliki arti yang berbeda dalam konteks budaya yang berbeda-beda, namun komersialisasi aspirasi aspirasi ini menunjuk kepada tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan ide pasar (Frederick Charles and Andrea's Schedler, 2005). Dalam konteks menjual suara, suara atau dukungan akan ditukar dengan uang yang menjadi fasilitas perubahan di dalam fenomena tersebut.

Secara hukum politik uang ini merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Dimana telah di atur di dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu baik Pilkada maupun Pilkadaes merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Praktik politik uang juga dapat dianggap sebagai kegiatan yang tidak mengamalkan nilai-nilai pancasila, dimana sebagai warga negara seharusnya perlu patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila melalui program yang disebut Orde Baru P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)(Rosa, 2022).

Dalam pilkades (pemilihan kepala desa) yang dilaksanakan pada tahun 2022 di Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Politik uang yang terjadi dapat dikategorikan sangat tinggi. Hal ini terjadi karena politik uang sudah menjadi hal yang lazim atau sudah menjadi budaya di dalam masyarakat Desa Puguh. Praktik politik uang ini sendiri sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.

Politik uang terjadi karena ruang sosial yang terbentuk pada wilayah menengah dan pinggiran merupakan ruang yang dibentuk melalui imajinasi pusat kekuasaan. Melalui formasi tersebut, subjek yang hadir mencoba untuk merebut dominasi yang dipresentasikan

melalui angka yang didapatkan melalui negosiasi-negosiasi (Rosa & Prasetyo, 2021). Di Desa Puguh para elit atau yang kerap dikenal sebagai orang-orang yang memiliki ambisi untuk memegang kekuasaan berupa kepala desa, mereka juga golongan orang-orang yang mendominasi, serta memiliki modal. Untuk mendapatkan suara atau dukungan para elit tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kedudukan, salah satu contoh yaitu praktik politik uang. Selain itu, keadaan masyarakat yang tidak paham akan nilai-nilai Pancasila serta kurangnya pemahaman mengenai politik juga memicu praktik politik uang ini berlangsung.

Pada praktiknya budaya politik uang ini dilakukan calon kepala desa atau para elit dengan cara membagikan uang kepada masyarakat sekitar melalui *kader-kader* atau tim sukses. Pada Pilkades tahun 2022 kandidat atau calon kepala desa sendiri berjumlah 2 orang, Yang artinya dua kandidat tersebut bersaing dalam mendapatkan suara terbanyak untuk menjadi kepala desa. Setiap kandidat atau calon kepala desa tersebut membagikan uang ke masyarakat dengan besaran umumnya 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kepala. Akan tetapi, terkadang ada beberapa warga desa yang meminta jumlah uang yang lebih, karena untuk memperbanyak suara dan memperluas relasi maka biasanya berapapun uang yang diminta akan diberikan sesuai dengan permintaan warga tersebut (nominal yang masih dianggap wajar).

Dalam penyebaran uang kepada masyarakat setempat dilakukan secara terang-terangan oleh para *kader* atau tim sukses masing-masing kandidat calon kepala desa. Karena transparannya pembagian uang tersebut membuat masyarakat biasanya mengetahui siapa saja yang memilih kubu satu dan kubu lainnya. Sehingga, terkadang membuat antar warga memilih untuk saling diam dan tidak menegur satu sama lain, yang akhirnya menimbulkan konflik akibat perbedaan pilihan. Untuk kasus Pilkades sebelumnya politik uang juga terjadi, sistem yang berlaku juga tak jauh berbeda dengan Pilkades tahun 2022.

Konflik sosial

Tak dapat dipungkiri pemilihan kepala desa di Desa Puguh ini menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi pada dasarnya bukan konflik fisik, akan tetapi konflik yang mengacu pada perselisihan pendapat yang akhirnya membuat dua kelompok masyarakat bersitegang satu sama lain. Konflik yang terjadi antar masyarakat ini tidak serta merta dapat langsung terselesaikan. Hal tersebut hanya menjadi seperti

kebiasaan masyarakat setiap pemilihan kepala desa dilaksanakan. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang lumrah dari jaman dulu pemilihan kepala desa diselenggarakan.

Konflik ini terjadi di dalam masyarakat karena adanya ambisi yang dimiliki para elit untuk menjadi kepala desa. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan banyak suara atau dukungan dilakukan dengan cara praktik politik uang yang memang telah menjadi budaya masyarakat. Praktik politik uang sendiri dapat diartikan bahwa para elit atau calon kepala desa mendominasi masyarakat sehingga terdapat ketidakadilan di dalam sistem sosial tersebut. Dominasi struktur kekuasaan ini yang mengancam solidaritas sosial.

Dalam kasus politik uang di Desa Puguh dimana para pemilih akan terpecah menjadi kubu yang berbeda, serta rasa solidaritas antar individu akan terpecah yang akhirnya menimbulkan konflik. Tidak adanya rasa solidaritas di dalam masyarakat Desa Puguh membuat masyarakatnya menjadi terpecah belah. Hubungan antar warganya dapat dikatakan tidak rukun. Dampaknya pun dapat dirasakan oleh semua pihak, ada beberapa keluarga yang terpecah akibat dari perbedaan pendapat tersebut, selain itu, tahapan konflik sampai pada dimana antar warga yang berada dikubu yang berbeda tidak bertegur sapa. Kondisi ini pun bertahan hingga penyelenggaraan Pilkades selanjutnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya konflik di dalam masyarakat ini adalah konflik berkelanjutan dari tahun ke tahun pemilihan kepala desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh peneliti di Desa Puguh Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk mengetahui fenomena politik uang, akan tetapi juga mengenai konflik sosial di masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik politik uang. Politik uang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Indonesia dan bisa dikatakan menjadi budaya pada saat pemilu sedang diselenggarakan, bahwasanya politik uang merupakan termasuk tindakan yang dilarang. Politik uang yang terjadi di Desa Puguh Kabupaten Kendal Jawa Tengah dapat dikatakan sangat tinggi, bagaimana masyarakat elitnya sangat mempunyai ambisi untuk mendapatkan kekuasaan, seperti pada pemilihan kepala desa di Desa Puguh Kabupaten Kendal Jawa Tengah akan melakukan bagaimana cara mendapatkan kekuasaan tersebut, hal seperti itu sudah menjadi budaya bagi masyarakat elit.

Cara yang dilakukan oleh Kepala Desa atau para elit yaitu membagikan uang kepada masyarakat sekitar melalui *kader-kader* atau tim sukses. Pada Pilkades tahun 2022 uang

yang dibagikan kepada masyarakat umumnya 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kepala.

Dengan adanya fenomena politik uang di Desa Puguh Kabupaten Kendal Jawa Tengah, yang disebabkan oleh dominasi para elit dapat memicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi merupakan mengenai perbedaan pilihan atau pendapat yang menyebabkan satu kelompok dengan kelompok lain bersitegang.

Saran:

1. Warga desa perlu diberikan pendidikan politik agar memiliki pemahaman yang matang tentang politik dalam menghadapi peristiwa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa. Dengan lebih objektif dalam menghadapi proses pemilihan kepala desa, akan tercipta kepala desa yang memiliki semangat aspiratif dan memiliki kemampuan yang baik.
2. Setiap pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa, terutama para calon kepala desa, perlu menunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi untuk bersaing secara adil dan seimbang.
3. Diperketatnya peraturan mengenai pemilu yang JURDIL

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, I. (2015). *Pilar demokrasi kelima: politik uang: realitas konstruksi politik uang di Kota Serang, Banten*. Deepublish.
- Budiardjo, M. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erviantono, T. (2017). Budaya Politik, Uang, dan Pilkada. *Jurnal Transformatif*, 3(2), 60-68. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/144#permission>.
- Falah, M. F., & Fauzi, A. M. (2021). Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(3). <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i3.1785>.
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1). <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.3243>.
- Hariato, H., Rahardjo, M., & Baru, B. (2018). POLITIK UANG DAN KONFLIK HORIZONTAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA, DI KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR. *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*, 2(1), 1593-1602. Retrieved from <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/192>.
- Haryanto, S. (2020). *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Rosa, D. V. (2022). Pancasila Dan Politik Toleransi Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* Vol, 6(01).
- ROSA, D. V., & PRASETYO, H. *Kiai dan Santrinya: Alterasi Politik Lokal dalam Ruang Demokrasi*. RFM Pramedia.
- Supraja, M. (2018). *Pengantar metodologi ilmu sosial kritis Jurgen Habermas*. UGM PRESS.